

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Menurut penjelasan dari *website* (jakartafire.net, 2021), sejarah DPKP Provinsi DKI Jakarta dimulai sejak masa sebelum kemerdekaan. Berdasarkan buku “DARI BRANDWEER BATAVIA KE DINAS KEBAKARAN DKI JAKARTA”, urusan pemadam kebakaran di kota Jakarta mulai diorganisir pada tahun 1873 oleh pemerintah Hindia Belanda. Urusan pemadam kebakaran ini secara hukum dibentuk oleh *Resident op Batavia* melalui ketentuan yang disebut sebagai: “*Reglement op de Brandweer in de Afdeeling stad vorsteden Van Batavia*”. Terjadi perubahan nomenklatur organisasi pemadam kebakaran pada tahun 1980, setelah masa kemerdekaan tahun 1980 – 2002, yakni dengan terbitnya Peraturan Daerah No. 9 tahun 1980, tentang struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebakaran DKI Jakarta. Pada masa tahun 2002 - sekarang terbit Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.9 tahun 2002, tanggal 15 Januari 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Provinsi DKI Jakarta.



Gambar 2.1 Logo Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta (Sumber: Dokumentasi *website* jakartafire.net)

2.2 Visi dan Misi Perusahaan

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Damkar dan Penanggulangan Bencana (2013 - 2017), DPKP Provinsi DKI Jakarta memiliki visi adalah sebagai berikut.

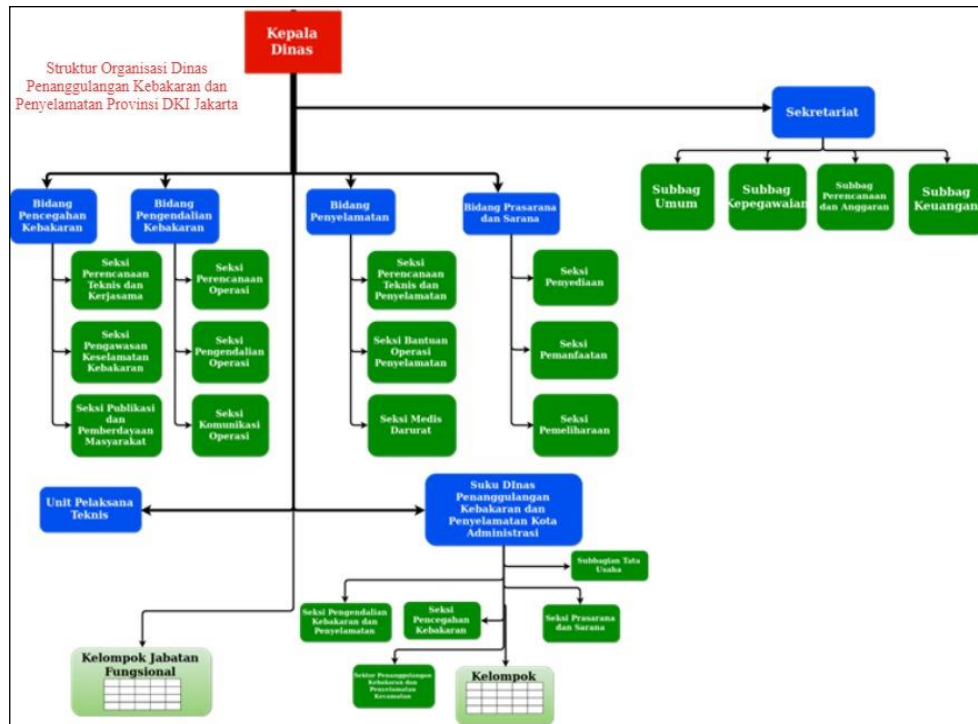
1. Terwujudnya dinas pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.

DPKP Provinsi DKI Jakarta memiliki misi adalah sebagai berikut.

1. Menyelenggarakan pengelolaan pencegahan kebakaran dan penyelamatan, penyelamatan penanggulangan kebakaran dan bencana yang efektif, efisien, terarah dan modern dengan mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat.
2. Menyelenggarakan peningkatan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana dan masyarakat serta melaksanakan penelitian dan pengembangan.
3. Menyelenggarakan pengelolaan sarana dan prasarana pemadaman kebakaran dan Penyelamatan.

2.3 Struktur Organisasi Perusahaan

Secara keseluruhan struktur organisasi pada DPKP Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2 Struktur Organisasi DPKP Provinsi DKI Jakarta (Sumber: Dokumentasi DPKP Provinsi DKI Jakarta)

Pada Gambar 2.2 tersebut dapat diidentifikasi setiap pekerjaan, fungsinya dan kemana setiap pegawai dalam suatu bagian harus mempertanggungjawabkan pekerjaan yang telah dilakukan. Bapak Jon Vendri, S.Si., MM selaku kepala bidang pencegahan kebakaran dan pembimbing magang. Peserta magang ditempatkan pada bagian bidang pencegahan kebakaran dan *website developer*.

Menurut Peraturan Gubernur No. 264 Tahun, 2016 pada BAB III ORGANISASI bagian kesatu susunan organisasi menyimpulkan bahwa pasal 4 terdiri dari susunan organisasi DPKP seperti kepala dinas, sekretariat (subbagian umum, subbagian kepegawaian, subbagian perencanaan dan anggaran, subbagian keuangan), bidang pencegahan kebakaran (seksi perencanaan teknis dan kerjasama, seksi pengawasan keselamatan kebakaran, seksi publikasi dan pemberdayaan masyarakat), bidang pengendalian kebakaran (seksi perencanaan operasi, seksi pengendalian operasi, seksi komunikasi operasi), bidang penyelamatan (seksi perencanaan teknis penyelamatan, seksi bantuan operasi

penyelamatan, seksi medis darurat), bidang prasarana dan sarana (seksi penyediaan, seksi pemanfaatan, seksi pemeliharaan).

Pada bagian kedua Kepala Dinas pasal 5, kepala dinas mempunyai tugas seperti memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3. Bagian ketiga Sekretariat pasal 6, merupakan unit kerja staf dinas. Pasal 7 yaitu sekretariat melaksanakan tugas administrasi dinas.

Pasal 8 yaitu sub bagian umum merupakan satuan kerja sekretariat dalam pelaksanaan administrasi umum dinas, sub bagian umum dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris dinas. Pasal 9 yaitu sub bagian kepegawaian merupakan satuan kerja sekretariat dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian dinas. Pasal 10 yaitu sub bagian perencanaan dan anggaran merupakan satuan kerja Sekretariat dalam pelaksanaan tugas perencanaan dan penganggaran dinas.